

KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Gustia¹, Jumaini.S², An Ras Try Astuti³

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

gustiajmd@iainpare.ac.id, jumaini2929@gmail.com

Abstract

Fiscal and monetary policy are the main instruments used by the government to manage a country's economy. Fiscal policy in Islam focuses on managing state revenues and expenditures in accordance with the principles of justice and social welfare. State revenues in the form of Zakat, Jizyah, and Kharaj are used to fund expenditures that support equitable economic and social development, such as equitable distribution of wealth and fulfillment of basic needs of the community. Monetary policy in an Islamic perspective is a practice to avoid usury (interest) and encourage the use of financial instruments based on the principle of profit sharing and real trade. The central bank in the Islamic economic system functions to ensure monetary stability through controlling the amount of money supply and maintaining the value of the currency with a mechanism that does not contain elements of usury. These two policies must be carried out in synergy to achieve the objectives of sustainable economic development, price stability and fair distribution of wealth in accordance with sharia principles. The implementation of fiscal and monetary policies in accordance with Islamic teachings is expected to provide an economic system that prioritizes justice and is able to face global economic challenges while upholding Islamic values.

Keywords: *Fiscal Policy, Monetary Policy, Islamic Perspective.*

Abstrak

Kebijakan Fiskal dan Moneter merupakan instrument utama yang digunakan oleh pihak pemerintah untuk mengelola perekonomian suatu Negara. Kebijakan Fiskal dalam Islam berfokus pada pengelolaan pendapatan dan pengeluaran Negara sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Pendapatan Negara dalam bentuk Zakat, Jizyah, dan Kharaj yang digunakan untuk mendanai pengeluaran yang mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan sosial, seperti pemerataan distribusi kekayaan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Adapun Kebijakan moneter dalam perspektif Islam adalah praktik untuk menghindari riba (Bunga) dan mendorong penggunaan instrumen keuangan berdasarkan prinsip bagi hasil dan perdagangan riil. Bank sentral dalam sistem ekonomi Islam berfungsi menjamin stabilitas moneter melalui pengendalian jumlah uang beredar dan menjaga nilai mata uang dengan mekanisme yang tidak mengandung unsur Riba. Kedua kebijakan ini harus dijalankan secara sinergi guna mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, stabilitas harga dan distribusi kekayaan yang adil sesuai dengan prinsip syariah. Penerapan kebijakan Fiskal dan Moneter yang sesuai dengan ajaran Islam diharapkan dapat memberikan sistem perekonomian lebih memprioritaskan keadilan serta mampu menghadapi tantangan ekonomi global dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.

Kata Kunci : Kebijakan Fiskal, Kebijakan Moneter, Perspektif Islam.

Pendahuluan

Perkembangan Ekonomi Islam Berkembang secara pesat, baik itu dari segi pengetahuan maupun kebijakan ekonomi, dan banyak mendapat respon positif di masyarakat. Keuangan Islam saat ini menjadi topik yang lazim dan terkenal baik di Negara-negara yang mayoritas Muslim dan Non Muslim. Pelayanan bank syariah terus diupayakan menuju pelayanan setinggi-tingginya tanpa unsur riba dan bunga, dengan slogan bank syariah melayani sesuai prinsip syariah. Pertumbuhan ekonomi sekali lagi memicu perdebatan mengenai efektivitas kebijakan publik yang bertujuan mencapai pertumbuhan yang “seimbang”. Terdapat beragam penjelasan mengenai keberhasilan Kebijakan Makroekonomi Pemerintah dalam melakukan penstabilan Output berdasarkan peristiwa ekonomi yang terjadi. Hal ini mengacu pada perspektif dari siklus Bisnis.

Kebijakan fiskal merupakan salah satu cara untuk mengatur kegiatan makroekonomi, selain kebijakan moneter ada juga kebijakan moneter yang berinteraksi dengan perekonomian dengan mendorong stabilitas perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam resesi, pengeluaran pemerintah dapat merangsang pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal ekspansif, meningkatkan pengeluaran pemerintah atau mengurangi pajak untuk meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian, menciptakan lebih banyak uang yang akan mengurangi pengangguran saat ini menjadi pendapatan lapangan kerja penuh.¹

Kebijakan moneter dirancang untuk menjaga keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal untuk mencapai tujuan makroekonomi. Stabilitas perekonomian dapat diukur dari penciptaan lapangan Kerja, Stabilitas Harga, Dan stabilitas nilai tukar mata uang asing. Jika stabilitas moneter terganggu maka pemulihan moneter dan keuangan (stabilizing effect) dapat terjadi. Sektor perbankan akan merasakan dampaknya terlebih dahulu pada sistem keuangan, baru kemudian berpindah ke sektor yang tepat. Pertumbuhan ekonomi yang kuat dan lapangan kerja yang berkelanjutan merupakan dua syarat penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara dan merupakan salah satu kriteria keberhasilan perekonomian suatu negara.

Kebijakan fiskal lainnya berkaitan dengan pajak. Pajak adalah uang pemerintah yang digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam hal ini Pajak sebagai salah satu Sumber Pendapatan Utama suatu Negara dan sangat penting bagi pemerintah untuk memenuhi tanggung jawabnya, terutama untuk menstabilkan perekonomian melalui proses penganggaran untuk menjamin tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai. Penerimaan pajak merupakan sumber belanja pemerintah terbesar pada belanja umum dan pembangunan.

¹ Sri Ani Rahayu, “Pengantar Kebijakan Fiskal” (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dan metodologi penelitian literatur untuk menganalisis kebijakan keuangan dan moneter dari perspektif Islam. Termasuk dalam pendekatan standar ini adalah karya yang menggunakan bibliografi, dokumen terkait, dan tipe data berupa dokumen yang terdapat pada sumber terbitan. Penulis kemudian menganalisis dan menarik kesimpulan dari sumber-sumber yang dikumpulkan untuk menjelaskan permasalahan kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Teknik pengumpulan data dikembangkan melalui sumber penerbitan sebagai berikut.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pengertian Kebijakan Fiskal Dan Moneter

1. Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal Merupakan penyesuaian pendapatan dan pengeluaran dari pihak pemerintah untuk mencapai stabilitas perekonomian yang lebih baik dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang di inginkan, yang pada Umumnya dapat ditentukan dalam rencana Pembangunan.² Menurut Pengantar Ekonomi Makro dan Mikro oleh Noberin, Kebijakan Fiskal adalah kebijakan ekonomi yang memiliki tujuan untuk memperbaiki suatu kondisi perekonomian dengan melakukan pengubahan dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah.³ Menurut Ibrahim, Kebijakan Fiskal merupakan kebijakan pemerintah YangMengkoordinasikan dan mengatur kegiatan perekonomian melalui kebijakan pendapatan dan belanja pemerintah. Kebijakan fiskal merupakan suatu sistem pemerintahan yang mengendalikan seluruh pendapatan Dan Pengeluaran pemerintah yang akan digunakan untu tetap menjaga kestabilan perekonomina guna untuk mendorong perlumbuan laju ekonomi.⁴

Kebijakan fiskal merupakan suatu sistem yang mengendalikan pengeluaran nasional dan pajak yang mempunyai pengaruh terhadap kondisi makroekonomi. Kondisi makroekonomi meliputi permintaan pasar agregat, lapangan kerja dan pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi. OJK juga mendefinisikan kebijakan fiskal sebagai kebijakan yang menangani pajak, pendapatan lain-lain, utang, dan belanja negara dengan tujuan tertentu seperti mendukung stabilitas perekonomian dan stabilitas keuangan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan memperluas kesempatan kerja.

² Wayan Sudirman, "Kebijakan Fiskal Dan Moneter, Teori Dan Empirikal" (Jakarta: Kencana, 2011).

³ "Pengantar Ilmu Ekonomi Makro Dan Mikro" (Yogyakarta: BPFE-UGM, 2000).

⁴ Muhammad Ibrahim, "Pengantar Kebijakan Fiskal" (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 193.

Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa Kebijakan Fiskal mempunyai Dua instrumen utama yaitu belanja Pemerintah dan Pendapatan dalam hal ini pajak. Ide keuangan pertama kali diperkenalkan oleh ekonom Inggris John Maynard Keynes pada akhir abad ke-19. Pemerintah diyakini mempunyai peran penting dalam pembangunan perekonomian negara, terutama dalam hal perluasan dan kontraksi siklus bisnis.

2. kebijakan moneter.

Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi perekonomian dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Dalam analisis makroekonomi, jumlah uang yang beredar mempunyai pengaruh penting terhadap tingkat output suatu perekonomian, serta stabilitas harga.. Besarnya ketidakstabilan arus kas pada aktivitas manufaktur secara umum akan terlihat akibat kenaikan harga seluruh komoditas dalam perekonomian. Kebijakan Moneter adalah Penggunaan Uang dan Suku Bunga untuk Menjadikan Perekonomian Lebih Stabil. Dalam perekonomian saat ini, kebijakan Moneter merupakan strategi yang lebih baik untuk melawan resesi dan mengurangi pengangguran dibandingkan kebijakan moneter.

Kebijakan moneter pertama-tama melibatkan perubahan kebijakan moneter dan suku bunga. Karena suku bunga mencerminkan permintaan agregat terhadap barang, jasa, dan investasi, dampaknya akan besar dan konstan dalam merangsang atau menekan aktivitas ekonomi. Faktor likuiditas bergantung pada suku bunga. Gagasan Kebijakan moneter adalah bahwa suku bunga yang lebih rendah akan menyebabkan konsumsi dan investasi yang lebih tinggi, yang akan meningkatkan tingkat permintaan agregat.

Suku bunga rendah mendorong konsumsi dengan memberikan pinjaman bank untuk membuat rumah dan mobil lebih menarik. Selain itu, suku bunga rendah menyebabkan investasi lebih tinggi karena meningkatnya peluang investasi di masa depan. Jika suatu bank ingin menambah jumlah uang beredar maka harus terjadi 3 hal yaitu: 1. Bank membeli surat berharga dari pemerintah untuk menambah jumlah uang beredar.; 2. Meningkatnya jumlah uang beredar akan menurunkan keuntungan; 3. Konsumen dan dunia usaha akan merespons dengan meminjam lebih banyak uang dan menggunakannya untuk membeli barang dan jasa yang lebih baik.

B. Konsep Fiskal dan Moneter Dalam Ekoonoomi Islam

1. Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Sistem keuangan Islam Memiliki Tujuan Untuk menciptakan masyarakat berdasarkan distribusi kekayaan yang adil dan mencapai keseimbangan antara nilai material dan

spiritual.⁵ Kebijakan Fiskal memiliki peran yang lebih besar dalam perekonomian Islam dibandingkan dengan perekonomian tradisional. Hal ini terjadi karena alasan berikut:

- a. Peran uang tunai dalam perekonomian Islam relatif terbatas dibandingkan dengan perekonomian tradisional, dan tidak lepas dari manfaatnya.
- b. Dalam perekonomian Islam, Negara wajib memungut zakat dari setiap muslim yang memiliki harta lebih dari jumlah tertentu (nisab) dan menggunakannya untuk keperluan resmi dalam Qasr Tawba: 60.
- c. Terdapat perbedaan yang signifikan dalam pengelolaan utang publik antara perekonomian Islam dan non-Islam. Hal ini karena utang syariah bebas bunga, dan sebagian besar pengeluaran pemerintah dibiayai melalui pajak atau dividen laba. Oleh karena itu, jumlah utang publik pada perekonomian Islam lebih kecil dibandingkan dengan perekonomian konvensional.

Jika melihat praktik kebijakan keuangan yang diterapkan oleh Nabi dan para khalifah hidayah, maka kebijakan keuangan dalam perekonomian Islam dapat dibedakan menjadi 3 hal.:⁶

1) Kebijakan Pendapatan Umat Islam:

Zakat merupakan salah satu prinsip utama Islam yang menjadi sumber pendapatan utama negara Islam pada era klasik. Dalam kebijakan pendapatan Islam Bea masuk yang dikenakan kepada seluruh pedagang, yang dibayarkan hanya setahun sekali dan hanya mencakup barang-barang di atas 200 dirham dengan tujuan untuk memperlancar perdagangan dan memperlancar arus perekonomian dalam perdagangan sehingga perekonomian negara yang dipimpinnya tetap berjalan dengan lancar. Ia mengatakan, barang milik Dubes dibebaskan bea masuk di wilayah Islam, jika sudah ada penukaran barang sebelumnya.

Wakaf Merupakan Harta benda yang diperuntukkan bagi Umat Islam yang akan dititipkan di Bayt Al-Mal. Uang terbaik berasal dari uang umat Islam yang meninggal tanpa ahli waris, atau dari uang umat Islam yang meninggalkan negaranya.

Nuwaib adalah pajak besar yang dikenakan pada warga Muslim kaya untuk membayar tagihan pemerintah pada saat darurat. Hal ini terjadi pada Perang Tabuk. Lima sumber daya diidentifikasi. Yang kelima terjadi pada masa pra-Islam. Denda

⁵ Muhammad, "Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Ekonomi Islam," n.d.

⁶ Perwataatmadja Karnaen, "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam" (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006).

penodaan agama atas pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Muslim pada acara keagamaan, seperti berburu pada saat ibadah haji.

2) Sistem pendapatan NonMuslim,yaitu.

Jizya (pajak modal/pajak kekayaan) adalah pajak yang dibayarkan oleh orang non-Muslim, khususnya Ahli Kitab, sebagai jaminan perlindungan jiwa, harta benda, ibadah, hak moral dan kebebasan dari dinas militer..Kharaj(pajak tanah,,pajak tanah) adalah pajak tanah yang dikenakan kepada non-Muslim pada masa penaklukan Khaybar. Kaum Muslim mengambil kepemilikan atas tanah tersebut dan pemilik lama menawarkan untuk menggarap tanah tersebut alih-alih menyewanya dan bersedia menyumbangkan sebagian dari koleksinya kepada pemerintah. Kebijakan serupa juga berlaku di sektor lain. Karaj menjadi sumber pendapatan utama. Pajak terhadap semua pedagang hanya dikenakan setahun sekali atas barang-barang yang bernilai lebih dari 200 dirham.

3) Kebijakan Pencairan

Mekanisme pengeluaran Pendapatan pemerintah didistribusikan langsung kepada penduduk yang berhak. Kelompok ini berhak menerima penghasilan (bagi hasil) berdasarkan prinsip luhur langsung dari Tuhan sebagaimana tercantum dalam Al-Quran QS.At-Ayat Taubat (90). Sedangkan zakat diperuntukkan bagi orang-orang fakir, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang terpaksa mengeluarkan zakat, guru-guru yang berbakat, para budak dan orang-orang yang berhutang di jalan Allah, serta orang-orang yang bertakwa. Ikuti jalan Allah dalam segala hal. Bijaksana, paling bijaksana. (Wahyu 9:60).Orangyang berhakmenerima zakatdikenal dengantujuh golongan. Kedelapan Ashnaf ini mendapat nasehat langsung dari Tuhan Yang Maha Esa agar tidak ada seorangpun yang membangkang. Artinya standar Al-Quran mengenai siapa yang berhak atas sumber daya negara lebih tinggi dibandingkan standar yang ditetapkan pemerintah kita yang umumnya hanya berlaku bagi masyarakat miskin.

2. Kebijakan moneter dalam Ekonomi Islam.

Kebijakan Moneter Merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk memperbaiki suatu kondisi perekonomian Negara dengan cara mengatur jumlah mata uang beredar.⁷ Tujuan dari kebijakan moneter tidak lain dari untuk mengatasi permasalahan ekonomi atau krisis ekonomi yang terjadi, selain dari itu perlu pengaturan sector Zero-Sum, yang tidak kalah pentingnya adalah dengan memperbaiki beberapa kesalahpahaman terkait masalah

⁷ Ir.Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 21

moneter. Jika dicermati dengan baik-baik, Krisi ekonomi Yang saat ini terjadi di Indonesia dan Dibelahan Dunia lainnya hal itu sebenarnya disebabkan oleh factor yang saling berkaitan dengan masalah keuangan.

Faktor Utamanya yaitu nilai mata uang dalam suatu Negara pada saat ini sangat bergantung pada mata uang dari negara lain, misalnya Rupee terhadap nilai dollar Amerika yang dimana jika nilainya tidak stabil berarti akan terjadi mempengaruhi stabilitas keuangan atau perekonomian juga. Jadi uang tidak hanya digunakan sebagai alat tukar semata tetapi juga sebagai alat kredit yang dapat diperdagangkan atau dilakukan transaksi yang dimana di jadikan pinjaman dengan adanya bunga. Hal ini termasuk riba dan sangat diharamkan oleh Islam.

Permasalahan kedua yaitu dapat diselesaikan dengan cara moderat jika segala bentuk transaksi yang melibatkan barang-barang keuntungan dinyatakan haram. Lembaga Keuangan Syariah. Termasuk bank syariah, mereka adalah satu-satunya perusahaan di Tanah Air yang secara sah menggantikan bank tradisional. Dengan mendambakan semua aktivitas yang menguntungkan, kita telah menghilangkan penyebab utama kekurangan uang. Di sisi lain, tetap membiarkan bank konvensional beroperasi (walaupun bank syariah juga beroperasi pada saat yang sama) sama saja dengan menciptakan penyakit yang sewaktu-waktu bisa kembali muncul dan menghancurkan fundamental perekonomian Indonesia.

Pada saat itu, perekonomian Jazirah Arab bergantung pada perdagangan, bukan real estate. Tidak ada minyak atau sumber daya alam lainnya. Jalur perdagangan antara Roma dan India melalui Jazirah Arab dikenal dengan Jalur Perdagangan Selatan. Saat ini, antara Roma dan Persia, jalur ini disebut Jalur Perdagangan Utara. Sekarang wilayah ini ditetapkan sebagai jalur perdagangan utara-selatan antara Suriah dan Yaman.

Perekonomian Arab pada masa Nabi (saw) bukanlah perekonomian terbelakang yang hanya mengenal pertukaran. Mata uang asing Persia dan Roma diakui oleh semua lapisan masyarakat Arab, dan dinar serta dirham digunakan sebagai pembayaran resmi. Kebijakan pertukaran bebas berlaku, dan tidak ada pembatasan impor dinar dan dirham. Transaksi tanpa uang tunai diterima secara luas di kalangan pedagang. Cek dan tagihan merupakan hal yang lumrah, misalnya saja Umar bin al-Khattab Radiallahu. Manfaatkan fitur ini untuk mempercepat impor baru dari Mesir ke Madinah.

C. Instrumen- Instrumen Fiskal Dalam Ekonomi Islam

1. Instrumen Fiskal dalam Ekonomi Islam

Instrumen keuangan dalam perekonomian Islam mencakup banyak instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur dan mengelola perekonomian sesuai prinsip syariah. Beberapa instrumen keuangan penting dalam ekonomi Islam adalah:

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam, dan wajib bagi umat Islam yang mampu untuk menyumbangkan sebagian uangnya kepada orang yang membutuhkan. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan, namun juga sebagai alat untuk mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan sosial.

Wakaf adalah pemberian harta benda secara sukarela untuk digunakan untuk tujuan keagamaan atau amal, seperti pendirian sekolah, rumah sakit, atau masjid. Aset yang dihibahkan tidak dapat dijual atau diwariskan, namun keuntungannya dapat digunakan untuk kepentingan umum.

Kharaj adalah pajak tanah yang dikenakan atas tanah pertanian yang disita oleh negara-negara Islam. Pajak digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur.

Jizyah adalah pajak yang dikenakan kepada non-Muslim yang tinggal di negara-negara Islam. Pajak memberikan hak kepada non-Muslim untuk tinggal di negara Islam dan mendapat perlindungan dari pemerintah.

Harta rampasan adalah rampasan perang yang diperoleh dalam peperangan. Dalam Islam, harta rampasan dibagi menjadi lima bagian, satu bagian diberikan kepada pemerintah untuk pekerjaan umum dan empat bagian diberikan kepada para pejuang.

Kesepuluh adalah pajak yang dikenakan terhadap hasil pertanian. Besarnya biaya tergantung pada sistem irigasi yang digunakan, apakah menggunakan tenaga buatan manusia atau tenaga alam (curah hujan).

Ketaatan pada prinsip syariah dalam praktik keuangan: Praktik keuangan dalam ekonomi syariah harus sesuai dengan prinsip syariah, seperti keadilan, kesejahteraan sosial, dan larangan riba (bunga).

Pembiayaan publik melalui instrumen syariah: Pemerintah dapat menerbitkan sukuk (obligasi syariah) sebagai instrumen keuangan. Sukuk berbeda dengan obligasi tradisional karena sukuk tidak melibatkan pembayaran bunga, melainkan mengandalkan pembagian keuntungan dari proyek yang dibiayai.

Instrumen keuangan ekonomi Islam menekankan keadilan sosial, redistribusi kekayaan, dan kesejahteraan sosial, sejalan dengan prinsip hukum Islam. Dengan menggunakan alat-alat ini, kami berharap dapat menciptakan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan ajaran Islam.

D. Kedudukan Instrumen Fiskal dan Moneter Dalam Perekonomian

1. Kedudukan Instrumen Fiskal Dalam Perekonomian

Instrumen fiskal memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian, baik dalam konteks ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam. Posisi instrumen fiskal dalam perekonomian dapat dijelaskan melalui beberapa aspek utama:

1.) Stabilisasi Ekonomi

Instrumen fiskal digunakan untuk meredam gejolak ekonomi, seperti resesi dan inflasi. Pada saat resesi, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran dan menurunkan pajak untuk menstimulasi perekonomian. Sebaliknya, pada saat inflasi, pengurangan pengeluaran dan peningkatan pajak dapat membantu mendinginkan perekonomian. Instrumen fiskal mempengaruhi permintaan agregat melalui perubahan pengeluaran pemerintah dan perpajakan, yang pada gilirannya mempengaruhi tingkat produksi dan lapangan kerja dalam perekonomian.

2) Redistribusi Kekayaan dan Keadilan Sosial

Instrumen seperti zakat dalam ekonomi Islam dan pajak progresif dalam ekonomi konvensional bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Zakat, misalnya, adalah instrumen redistribusi yang memastikan bahwa kekayaan berputar di antara semua lapisan masyarakat. Pengeluaran pemerintah melalui subsidi dan program bantuan sosial membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu, memastikan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan..

3) Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur

Instrumen fiskal digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang, seperti jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit. Pengeluaran untuk infrastruktur dan layanan publik meningkatkan produktivitas ekonomi.

4) Pengendalian Inflasi dan Defisit Anggaran

Instrumen fiskal membantu mengelola inflasi dengan mengendalikan pengeluaran pemerintah dan kebijakan perpajakan, yang mempengaruhi permintaan agregat. Kebijakan fiskal yang bijaksana diperlukan untuk memastikan bahwa pengeluaran pemerintah tidak menyebabkan defisit anggaran yang berlebihan, yang dapat menyebabkan masalah seperti peningkatan utang publik dan tekanan inflasi.

5) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Melalui instrumen seperti insentif pajak dan pengeluaran pemerintah yang ditargetkan, kebijakan fiskal dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan investasi dan konsumsi. Pemerintah dapat mendukung penelitian dan pengembangan serta pendidikan melalui pengeluaran fiskal, yang berkontribusi pada inovasi dan peningkatan daya saing ekonomi.

6) Menciptakan Stabilitas Ekonomi Makro

Instrumen fiskal digunakan dengan cara yang berlawanan dengan siklus untuk menstabilkan ekonomi. Selama periode pertumbuhan yang cepat, pemerintah dapat menghemat dan mengurangi pengeluaran, sedangkan selama resesi, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran untuk menstimulasi ekonomi. Kebijakan fiskal yang konsisten dan dapat diprediksi dapat meningkatkan kepercayaan investor, yang penting untuk investasi jangka panjang dan pertumbuhan ekonomi.

7) Menjaga Keseimbangan Ekonomi Regional

Instrumen fiskal dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah dengan mengalokasikan lebih banyak dana ke daerah-daerah yang kurang berkembang, sehingga menciptakan keseimbangan pembangunan antar daerah.

Secara keseluruhan, instrumen fiskal memainkan peran sentral dalam mencapai tujuan ekonomi seperti stabilitas, pertumbuhan, redistribusi kekayaan, dan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ekonomi Islam, instrumen-instrumen seperti zakat, wakaf, dan pajak berbasis syariah juga menambahkan dimensi keadilan sosial dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip agama.

2. Kedudukan Instrumen Moneter Dalam Perekonomian

Instrumen keuangan memegang peranan penting dalam perekonomian, baik dalam sistem konvensional maupun dalam perekonomian Islam. Instrumen moneter yang digunakan bank sentral untuk mengelola jumlah uang yang beredar guna mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi seperti stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan neraca pembayaran. Dampak instrumen keuangan terhadap sistem keuangan adalah sebagai berikut;

1) Stabilitas Harga (Inflasi)

Bank sentral menggunakan instrumen moneter untuk mengendalikan inflasi. Bank sentral dapat mengurangi tekanan inflasi dengan menaikkan suku bunga

atau mengurangi jumlah uang beredar. Alternatifnya, bank sentral dapat menurunkan suku bunga atau meningkatkan jumlah uang beredar untuk mendorong konsumsi dan investasi guna memerangi inflasi.

2) Mendorong pertumbuhan ekonomi

Selama resesi, bank sentral dapat menurunkan suku bunga untuk mendorong pinjaman dan investasi. Hal ini meningkatkan permintaan agregat dan membantu pemulihan ekonomi. Melalui operasi pasar terbuka, bank sentral dapat meningkatkan likuiditas dalam sistem perbankan, sehingga bank memiliki lebih banyak dana untuk dipinjamkan kepada pelaku ekonomi.

3) Tingkat Suku Bunga dan Manajemen Investasi

Tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral mempengaruhi biaya pinjaman dan imbal hasil deposito. Tingkat suku bunga yang lebih rendah mendorong peminjaman dan investasi, sementara tingkat suku bunga yang lebih tinggi mendorong tabungan dan menekan inflasi. Instrumen moneter seperti rasio cadangan wajib mempengaruhi kemampuan bank untuk menyalurkan kredit, yang berdampak langsung pada tingkat investasi dalam perekonomian.

4) Manajemen Nilai Tukar

Melalui intervensi di pasar valuta asing, bank sentral dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang domestik. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas harga barang impor dan daya saing ekspor. Mempertahankan cadangan devisa yang cukup membantu bank sentral mengatasi fluktuasi nilai tukar yang berlebihan.

5) Stabilitas Sistem Keuangan

Bank sentral menggunakan instrumen moneter untuk mengawasi dan mengatur sektor perbankan, memastikan bahwa bank memiliki cadangan yang cukup dan mematuhi peraturan yang ada untuk mencegah krisis keuangan. Bank sentral bertindak sebagai pemberi pinjaman terakhir bagi bank-bank yang menghadapi masalah likuiditas, sehingga mencegah kegagalan bank yang dapat berdampak sistemik.

6) Mengendalikan Jumlah Uang Beredar

Bank sentral membeli atau menjual sekuritas (seperti obligasi pemerintah) untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Tingkat diskonto adalah tingkat bunga yang dikenakan bank sentral untuk pinjaman jangka pendek kepada bank-bank komersial, yang mempengaruhi jumlah uang yang dapat dipinjam oleh bank.

7) Meningkatkan Keyakinan dan Stabilitas Ekonomi Makro

Konsistensi dan transparansi kebijakan moneter meningkatkan kepercayaan pelaku ekonomi terhadap stabilitas ekonomi makro. Dengan mengelola ekspektasi inflasi, bank sentral dapat mempengaruhi pola konsumsi dan investasi yang berdampak pada stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi.

8) Dukungan Kebijakan Fiskal

Kebijakan moneter seringkali perlu dikoordinasikan dengan kebijakan fiskal untuk memaksimalkan pencapaian tujuan fiskal. Misalnya, dalam masa resesi, kebijakan moneter ekspansif dapat membantu stimulus fiskal untuk mendorong pemulihan ekonomi.

9) Penerapan Syariah dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, instrumen keuangan harus mematuhi hukum syariah yang melarang usura (bunga).. Instrumen seperti sukuk (obligasi syariah), mudarabah, dan musharakah digunakan untuk mengelola likuiditas dan pembiayaan. Instrumen moneter dalam ekonomi Islam juga berfokus pada keadilan sosial dan pemerataan distribusi kekayaan, mendukung instrumen fiskal seperti zakat dan wakaf.

Secara keseluruhan, instrumen moneter memainkan peran sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, mengendalikan inflasi, dan memastikan stabilitas sistem keuangan. Dalam konteks ekonomi Islam, instrumen-instrumen ini juga harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, yang menekankan pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

E. Implikasi Pelarangan Riba Dalam Perekonomian

Sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Al-Qur'an dengan secara jelas mengenai Larang melakukan kegiatan riba dan hal itu dilakuk. Namun, pada zakat modern sekarang ketika riba sudah mulai disamakan dengan bunga yang ada pada lembaga keuangan, maka hal-hal ini berkaitan dengan ayat-ayat yang menerangkan tentang riba. Berikut adalah ayat yang menjelaskan tentang riba menurut Muhammad Shahrur:⁸

1. Yang pertama yaitu Riba erat kaitannya dengan sedekah, hal ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah : 276

⁸ Maftukhin, Nuansa Studi Islam: Sebuah Pergulatan Pemikiran, (Yogyakarta: CV. Sukses Offset, 2010), h. 158-159.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Term Riba Diantonimkan dengan *Shodaqoh* Dimana *Shodaqah* memiliki *penegrtian*⁹ sebagai pemberian harta kepada orang-orang fakir atau orang yang membutuhkan tanpa disertai imbalan (semua bentuk pemberian), identik dengan zakat seperti yang ada dalam *nash* QS At-Taubah: 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

menjelaskan tentang ashnaf yang berhak menerima zakat, dan shodaqoh adalah sesuatu yang ma'ruf (menurut syariat yang benar), berdasarkan hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda *كل صدقة معروف*. Jika dikaitkan dengan ilmu ekonomi, kata *yurbii shodaqot* dapat juga berarti meningkatkan taraf perekonomian pemberi dan penerima sedekah guna memperbaiki keadaan perekonomian masyarakat dan negara dimana ia berada.¹⁰

- a. Meningkatkan daya beli.
- b. Meningkatkan produktivitas masyarakat dan mengurangi pengangguran.
- c. Untuk menciptakan kesetaraan dalam distribusi kekayaan.

Kata sedekah disebutkan sebanyak 20 kali dalam Al-Qur'an, yaitu kita mendermakan sebagian harta kita kepada fakir miskin, anak yatim, pengemis dan orang yang berhutang. Dengan cara ini, Islam menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat kelas bawah yang secara ekonomi sangat lemah. Menurut pendapat Suddi, pada prinsipnya sedekah diberikan kepada orang miskin.¹¹

2. Kedua, riba berkaitan dengan zakat. Yang merupakan kesimpulan dari Ar-Rum: 39

⁹ Abdul Wahid Al-Faizin, Nashr Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer*, (Jakarta: Madani Publising, 2010), h. 123-124.

¹⁰ Maftukhin, Nuansa Studi Islam: Sebuah Pergulatan Pemikiran, (Yogyakarta: CV. Sukses Offset, 2010), h. 126

¹¹ Maftukhin, Nuansa Studi Islam: Sebuah Pergulatan Pemikiran, (Yogyakarta: CV. Sukses Offset, 2010), h. 46

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيزْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Dimana kata usura pada ayat ini identik dengan zakat, maka usura tidak akan menambah apapun di sisi Allah, dan zakat akan memberikan pahala yang berlipat ganda.

3. Ketiga, berkaitan dengan penentuan batas atas bunga (bagi hasil) yang merupakan kesimpulan dari surat Ali Imran: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Adl'afan mudla'afan diartikan sebagai peningkatan lebih dari 100% dari nilai maksimal. Implikasi praktisnya adalah pembiayaan yang dihasilkan oleh bank syariah tidak dapat menuntut bagi hasil yang melebihi nilai pokok pinjaman. Jika kenaikannya 2 kali lipat dari nilai pokok maka disebut riba.

F. Kebijakan uang beredar dalam Ekonomi Islam.

Instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam dirancang untuk mengatur jumlah uang beredar dan stabilitas ekonomi dengan tetap mengikuti prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah beberapa instrumen kebijakan untuk mengatur jumlah uang beredar dalam ekonomi Islam:

a. Rasio Cadangan Wajib

Bank sentral dapat menetapkan persentase cadangan wajib yang harus dimiliki oleh bank umum. Hal ini membantu mengendalikan jumlah uang yang dapat dipinjamkan oleh bank, sehingga mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Ketika cadangan meningkat, pergerakan pasar terbuka dan fluktuasi tingkat diskonto tidak seperti yang diharapkan. Jika kelebihan cadangan disimpan oleh bank komersial untuk mempengaruhi jumlah uang beredar, tindakan paling efektif yang dapat diambil bank sentral adalah mengubah tingkat cadangan minimum. Kelebihan cadangan yang dimiliki bank umum akan dihilangkan dengan meningkatkan tingkat cadangan minimum. Misalnya, cadangan minimumnya 20 persen, tapi bank umum umumnya punya 25 persen. Dalam kondisi seperti ini, operasi pasar terbuka dan fluktuasi suku bunga tidak akan berpengaruh terhadap

jumlah uang beredar. Untuk mempengaruhi jumlah uang beredar, langkah pertama adalah menaikkan tingkat cadangan menjadi dua puluh lima persen.

b. Operasi Pasar Terbuka

Dalam konteks ekonomi Islam, operasi pasar terbuka dilakukan dengan membeli dan menjual sukuk (surat utang Islam) dan bukan obligasi konvensional. Hal ini mempengaruhi likuiditas perbankan dan tingkat suku bunga yang diterima di pasar.

c. Penetapan Margin Keuntungan Alih-alih menetapkan suku bunga, bank sentral dalam sistem ekonomi Islam dapat menetapkan margin keuntungan untuk produk pembiayaan berbasis syariah, seperti murabahah (jual beli dengan penambahan margin keuntungan).

d. Pembiayaan Pembangunan

Bank sentral dapat menyediakan pembiayaan berbasis proyek atau pembiayaan sektor riil melalui instrumen seperti mudarabah (kemitraan usaha) atau musharakah (pembiayaan bersama), yang mendukung kegiatan ekonomi produktif tanpa melibatkan riba (bunga).

e. Wadiah (Titipan)

Bank sentral dapat menerima dana dari bank-bank komersial dalam bentuk wadiah (titipan), dimana dana tersebut digunakan untuk menjaga stabilitas moneter dan memberikan rasa aman bagi penitip dana tanpa mendapatkan bunga.

f. Pengendalian Kredit

Mengatur jumlah kredit yang dapat diberikan oleh bank-bank komersial untuk mencegah spekulasi dan memastikan bahwa pembiayaan diarahkan pada sektor-sektor yang produktif dan halal (sesuai syariah).

g. Penetapan Tingkat Pembiayaan Murabahah

Dalam konteks perbankan Islam, bank sentral dapat mengatur tingkat maksimum margin keuntungan yang dapat dikenakan dalam transaksi murabahah untuk mengendalikan biaya pembiayaan di pasar.

h. Instrumen Zakat dan Wakaf

Meskipun lebih bersifat fiskal, instrumen seperti zakat dan wakaf juga dapat mempengaruhi kebijakan moneter dengan mengalirkan dana ke dalam ekonomi, meningkatkan likuiditas dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

i. Penerbitan Sukuk oleh Pemerintah

Penerbitan sukuk oleh pemerintah dapat digunakan untuk mengelola likuiditas dan menyediakan alat investasi yang sesuai syariah bagi investor. Sukuk membantu dalam pengelolaan uang beredar sambil memastikan proyek-proyek yang didanai sesuai dengan prinsip syariah.

j. Konsultasi dan Pengawasan Syariah

Setiap kebijakan moneter dalam ekonomi Islam harus diawasi dan disetujui oleh dewan penasihat syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam.

Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi, tetapi juga pada keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang adil. Semua instrumen dan kebijakan harus sesuai dengan hukum syariah dan berkontribusi pada kesejahteraan umum.

Kesimpulan

Kebijakan fiskal ditujukan untuk menyesuaikan pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk menjamin stabilitas perekonomian yang lebih baik dan untuk mencapai tingkat inflasi yang diinginkan yang umumnya ditentukan dalam rencana pembangunan. Kebijakan fiskal mempunyai dua instrumen utama yaitu belanja dan penerimaan negara, dalam hal ini pajak. Kebijakan moneter merupakan kebijakan stabilitas perekonomian, dan kebijakan moneter dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan defisit fiskal.

Ada empat instrumen utama yang mengatur jumlah uang beredar: Operasi Pasar Terbuka, Fasilitas Diskonto, Rasio Cadangan Wajib, dan Persuasi Moral. Kebijakan fiskal dan moneter dalam perspektif Islam menekankan keseimbangan antara tujuan ekonomi dan nilai-nilai moral. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan penghindaran riba, sistem ekonomi Islam berusaha menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan dan distribusi kekayaan yang adil. Penerapan kebijakan ini membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press. 2003.
- Abdullah, Saeed. Bank Islam dan Bunga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Al-Faizin, Abdul Wahid; Akbar, Nashr. Tafsir Ekonomi Kontemporer. Jakarta: Madani Publishing. 2010.
- Hadi, Muhammad. "Paradigma Masterpiece Keuangan Islam Dan Aplikasinya Di Perbankan Syariah," 93. Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2019.
- Ibrahim, Muhammad. "Pengantar Kebijakan Fiskal," 193. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Karnaen, Perwataatmadja. "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam." Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006.
- Muhammad. "Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Ekonomi Islam," n.d. "Pengantar Ilmu Ekonomi Makro Dan Mikro." Yogyakarta: BPFE-UGM, 2000.
- Rahayu, Sri Ani. "Pengantar Kebijakan Fiskal." Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011.
- Sudirman, Wayan. "Kebijakan Fiskal Dan Moneter, Teori Dan Empirikal." Jakarta: Kencana, 2011.